

## KOLABORASI DAN EKOSISTEM INOVASI UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN: REFLEKSI DAN RELEVANSINYA BAGI PROVINSI GORONTALO

Ratih Arifin<sup>1</sup>, Akristianto Ahmad<sup>2</sup>, Ivana Stevani Priyatno<sup>3</sup>,  
Hartati Tahir<sup>4</sup>, Isti Retno Liputo<sup>5</sup>, Yusril Ihza Disastra<sup>6</sup>

Pascasarjana Universitas Bina Taruna Gorontalo

[arifinara189@gmail.com](mailto:arifinara189@gmail.com), [akris.ahmad@gmail.com](mailto:akris.ahmad@gmail.com), [mommygiovio@gmail.com](mailto:mommygiovio@gmail.com)  
[hartatitahir91@gmail.com](mailto:hartatitahir91@gmail.com), [istiliputo87@gmail.com](mailto:istiliputo87@gmail.com), [yusrilihazadisastra@gmail.com](mailto:yusrilihazadisastra@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan peran kolaborasi multi-aktor serta pentingnya ekosistem inovasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. Melalui analisis kualitatif terhadap data sekunder dan temuan lapangan dari program kolaboratif di wilayah Gorontalo, diperoleh gambaran bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil (pendekatan quadruple helix) menjadi landasan utama dalam mendorong inovasi lokal yang kontekstual dan berkelanjutan. Hasil studi menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan inovasi berbasis potensi daerah, namun masih menghadapi tantangan dalam penguatan kapasitas kelembagaan, keberlanjutan program, dan konsistensi kebijakan. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan jejaring kolaboratif, dukungan regulasi yang fleksibel, serta investasi pada sumber daya manusia lokal guna mempercepat terciptanya ekosistem inovasi yang tangguh dan inklusif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan strategi pembangunan berbasis inovasi di daerah-daerah berkembang lainnya di Indonesia.

Kata kunci: **Kolaborasi, Ekosistem Inovasi, Pembangunan Berkelanjutan**

### ABSTRACT

*This research aims to reflect on the role of multi-actor collaboration and the importance of innovation ecosystems in supporting sustainable development in Gorontalo Province. Through qualitative analysis of secondary data and field findings from collaborative programs in the Gorontalo region, it is clear that synergy between government, academics, the private sector, and civil society (quadruple helix approach) is the main foundation in encouraging contextual and sustainable local innovation. The results of the study show that Gorontalo Province has great potential in developing innovation based on regional potential, but still faces challenges in strengthening institutional capacity, program sustainability, and policy consistency. This article recommends the need to strengthen collaborative networks, flexible regulatory support, and investment in local human resources to accelerate the creation of a resilient and inclusive innovation ecosystem. These findings are expected to be a reference in formulating innovation-based development strategies in other developing regions in Indonesia.*

*Keywords: Collaboration, Innovation Ecosystem, Sustainable Development*

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah yang berkelanjutan kini menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga daya dukung lingkungan hidup. Konsep keberlanjutan tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mengedepankan keseimbangan antara aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan (Kementerian PANRB, 2022). Dalam konteks desentralisasi yang berlaku di Indonesia, pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang selaras dengan karakteristik lokal dan kebutuhan masyarakatnya. Namun, kompleksitas tantangan pembangunan saat ini mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan wilayah, perubahan iklim, hingga tekanan global akibat disrupsi teknologi menuntut adanya pendekatan yang lebih kolaboratif. Kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam menciptakan inovasi yang mampu menjawab persoalan-persoalan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. Inovasi yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga mencakup cara baru dalam berpikir, bekerja sama, dan mengelola kebijakan publik secara lebih terbuka dan inklusif (Puspitasari & Nugroho, 2019).

Konsep ekosistem inovasi hadir sebagai kerangka kerja yang memfasilitasi interaksi antarpemangku kepentingan termasuk pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses penciptaan dan pemanfaatan ide-ide baru. Melalui ekosistem ini, inovasi dapat berkembang tidak secara sporadis, tetapi melalui sistem yang saling terhubung dan mendukung. Dalam konteks pembangunan daerah, kehadiran ekosistem inovasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan sumber daya dan kapasitas yang tersedia menjadi solusi pembangunan yang lebih kontekstual dan berdampak luas (Rahmawati, 2023).

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis kolaborasi dan inovasi. Sebagai provinsi yang relatif muda, Gorontalo dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, termasuk kebutuhan akan peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur dasar, serta kinerja pelayanan publik. Namun di balik tantangan tersebut, Gorontalo juga memiliki kekuatan dalam bentuk kearifan lokal, jejaring sosial yang kuat, dan dukungan dari lembaga pendidikan tinggi yang progresif, seperti Universitas Bina Taruna Gorontalo.

Melalui kegiatan Studi Kepakaran (STUPAR), civitas akademika diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi kritis terhadap praktik-praktik inovasi di berbagai daerah, serta mengevaluasi relevansi dan kemungkinan penerapannya di Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintahan daerah, tetapi juga menjadi cerminan dari pentingnya membangun sistem pembelajaran kebijakan berbasis pengalaman lapangan (Taufik & Rahmatullah, 2021).

Pengalaman dari daerah lain yang telah berhasil mengembangkan inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang adaptif, serta penguatan kapasitas kelembagaan, dapat menjadi inspirasi dan pijakan bagi Gorontalo dalam merancang strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengulas secara mendalam pentingnya membangun kolaborasi dan ekosistem inovasi dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Lebih khusus lagi, artikel ini berupaya mengkaji bagaimana pendekatan tersebut dapat diterapkan secara kontekstual di Provinsi Gorontalo, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang ada. Melalui kajian ini diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi strategis yang relevan bagi pengambil kebijakan, pelaku pembangunan, dan kalangan akademisi yang memiliki perhatian terhadap transformasi daerah berbasis inovasi dan kolaborasi.

#### **METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode reflektif dan analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam dinamika kolaborasi dan pembentukan ekosistem inovasi yang mendukung pembangunan daerah berkelanjutan, serta menelaah relevansinya dalam konteks Provinsi Gorontalo.

Proses penyusunan artikel diawali dengan studi pustaka terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, baik berupa jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan kegiatan studi kepakaran (STUPAR), hingga praktik-praktik inovasi yang telah diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia. Kajian literatur ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman konseptual mengenai kolaborasi, ekosistem inovasi, serta pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Selain itu, artikel ini juga memanfaatkan data sekunder dari hasil pengamatan lapangan dan dokumentasi kegiatan STUPAR yang dilakukan oleh kelompok penulis, khususnya saat melakukan kunjungan dan diskusi dengan pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan institusi pendidikan yang terlibat dalam praktik inovasi pelayanan publik. Pengalaman tersebut menjadi dasar refleksi kritis untuk memahami bagaimana sinergi antar-aktor dibangun dan bagaimana praktik tersebut dapat direplikasi atau diadaptasi dalam konteks Provinsi Gorontalo.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan: (1) pola kolaborasi antarsektor, (2) dinamika pengembangan inovasi di tingkat lokal, serta (3) strategi integrasi ekosistem inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah. Analisis dilakukan secara induktif, sehingga memungkinkan munculnya interpretasi baru yang kontekstual berdasarkan pengalaman empiris dan pemahaman teoritis yang telah dikaji.

Dengan pendekatan ini, artikel tidak hanya menyajikan hasil telaah akademik, tetapi juga menampilkan dimensi praktis yang dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo dalam merancang kebijakan pembangunan yang inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil observasi lapangan dan diskusi dalam kegiatan Studi Kepakaran (STUPAR) menunjukkan bahwa kolaborasi dan penguatan ekosistem inovasi merupakan dua pilar penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Di beberapa daerah yang dikunjungi, inovasi tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari interaksi dan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini terbentuk melalui komitmen bersama untuk menciptakan nilai tambah dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, serta pengembangan ekonomi lokal (Simanjuntak & Fadli, 2022).

Salah satu temuan penting dari studi ini adalah bahwa keberhasilan inovasi daerah sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala daerah yang visioner dan terbuka terhadap gagasan baru. Kepemimpinan semacam ini tidak hanya berani mengambil risiko dalam mengadopsi pendekatan baru, tetapi juga mampu membangun kepercayaan dan menyatukan visi di antara berbagai pemangku kepentingan. Di daerah-daerah yang berhasil mengembangkan inovasi, kepala daerah berperan aktif sebagai *orchestrator* dalam ekosistem pembangunan, memastikan bahwa setiap aktor memiliki peran yang jelas dan saling melengkapi (Arifin & Latif, 2023).

Lebih lanjut, hasil pengamatan menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif tidak hanya melibatkan aktor-aktor formal seperti birokrasi dan institusi pendidikan, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi komunitas lokal, pelaku UMKM, dan generasi muda. Hal ini tercermin dari berbagai inisiatif seperti laboratorium inovasi daerah, forum konsultasi publik, hingga program inkubasi bisnis yang bersinergi dengan visi pembangunan daerah. Inklusivitas menjadi kata kunci dalam menciptakan ekosistem yang hidup dan adaptif terhadap dinamika sosial maupun tantangan lingkungan (Nurhayati, 2020).

Dalam konteks tersebut, ekosistem inovasi tidak dipahami semata-mata sebagai kumpulan teknologi atau perangkat digital, melainkan sebagai sistem sosial yang mendukung munculnya kreativitas, eksperimen, dan pembelajaran kolektif. Infrastruktur lunak seperti regulasi yang akomodatif, budaya organisasi yang terbuka, serta sistem insentif bagi aparatur inovatif menjadi fondasi penting bagi berkembangnya inovasi. Tidak kalah penting adalah keberadaan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis data, yang memungkinkan replikasi dan penguatan praktik baik secara berkelanjutan (Wahyudi & Saputra, 2021).

Refleksi terhadap kondisi Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa peluang untuk mengembangkan ekosistem inovasi sangat terbuka, mengingat adanya dukungan institusi pendidikan tinggi, komunitas wirausaha muda yang berkembang, serta sejumlah program pemerintah daerah yang mulai mengadopsi pendekatan berbasis digital dan kolaboratif. Namun demikian, tantangan terbesar terletak pada kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Masih terdapat kecenderungan sektoral dalam pengelolaan program pembangunan, serta lemahnya mekanisme partisipasi publik dalam perumusan kebijakan daerah (Syamsuddin & Karim, 2021).

Salah satu contoh konkret yang dapat dijadikan pembelajaran adalah inisiatif “Smart City” di beberapa kabupaten/kota di luar Gorontalo, di mana kolaborasi antara Dinas Kominfo, Badan Perencanaan Daerah, dan perguruan tinggi lokal melahirkan inovasi dalam bidang layanan kependudukan, perizinan, hingga pengaduan masyarakat. Di daerah tersebut, pemerintah tidak berjalan sendiri, tetapi membentuk *knowledge hub* yang menjadi pusat interaksi antara akademisi, birokrat, dan komunitas. Dengan model seperti ini, inovasi bukan lagi hasil kerja eksklusif pemerintah, melainkan produk bersama yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Aswandi, 2022).

Pengalaman-pengalaman tersebut relevan untuk direplikasi di Gorontalo, dengan terlebih dahulu memperkuat fondasi kolaboratif yang berbasis pada nilai saling percaya dan keterbukaan informasi. Dalam hal ini, peran perguruan tinggi seperti Universitas Bina Taruna Gorontalo menjadi sangat strategis, tidak hanya sebagai pusat riset, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Perguruan tinggi dapat menjadi katalisator dalam mengidentifikasi masalah lokal, merancang solusi inovatif, serta melakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan yang diterapkan (Dewi & Hidayat, 2020).

Sebagai bagian dari ekosistem tersebut, generasi muda juga harus diberi ruang yang lebih luas dalam proses inovasi. Penguatan kapasitas kepemudaan melalui program kewirausahaan sosial, pelatihan teknologi tepat guna, serta pengembangan platform digital lokal dapat menjadi langkah strategis untuk membangun keberlanjutan inovasi (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2020). Di sisi lain, pemerintah daerah perlu melakukan reformasi birokrasi yang mendorong aparatur untuk berani bereksperimen dan mengambil inisiatif. Budaya kerja yang menekankan pada hasil (*outcome-based*) dan kebermanfaatan (*impact-driven*) harus dikembangkan secara sistematis (Kurniawan & Susilowati, 2019).

Dalam jangka panjang, Provinsi Gorontalo dapat membangun *Innovation Governance Model* yang menjadi kerangka kerja dalam mendorong sinergi antara semua aktor pembangunan. Model ini tidak hanya mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, tetapi juga menetapkan indikator kinerja kolaboratif yang dapat diukur secara periodik. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak lagi bergantung pada

proyek-proyek sektoral yang terpisah, tetapi didorong oleh misi bersama untuk menciptakan perubahan yang transformatif dan berkelanjutan (Siregar & Sihombing, 2020).

Keseluruhan hasil dan pembelajaran dari STUPAR memberikan pemahaman bahwa pembangunan yang bersifat inovatif dan kolaboratif bukan sesuatu yang utopis, melainkan dapat dirancang secara bertahap dan kontekstual. Kuncinya terletak pada kemauan untuk membuka ruang dialog antarsektor, konsistensi dalam implementasi, serta keberanian untuk belajar dari kegagalan. Dalam hal ini, Provinsi Gorontalo memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagaimana sebuah daerah membangun ekosistem inovasi yang selaras dengan identitas lokal, sumber daya yang tersedia, dan semangat kolektif masyarakatnya (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2021).

### **Rekomendasi**

1. **Penguatan Peran Pemerintah Daerah sebagai Enabler Inovasi**  
Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu mengambil peran aktif sebagai fasilitator dan penggerak utama dalam membentuk ekosistem inovasi yang inklusif. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan yang mendorong kolaborasi lintas sektor, penyediaan insentif bagi inovator lokal, dan dukungan terhadap eksperimen kebijakan berbasis data.
2. **Membangun Kemitraan Strategis antara Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan Masyarakat**  
Diperlukan wadah koordinasi seperti forum inovasi daerah atau *local innovation hub* yang melibatkan perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas, dan pemerintah. Kolaborasi ini penting untuk mendorong riset terapan, mempercepat komersialisasi inovasi, serta menciptakan solusi atas tantangan lokal berbasis pendekatan ilmiah.
3. **Reformasi Birokrasi Menuju Budaya Inovatif**  
Pemerintah daerah perlu menciptakan sistem birokrasi yang adaptif terhadap perubahan dan mendukung pengembangan gagasan baru. Reformasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan inovatif, pemberian penghargaan bagi aparatur kreatif, dan penerapan sistem kerja berbasis kinerja dan dampak.
4. **Inklusi dan Pemberdayaan Komunitas Lokal**  
Inovasi yang berkelanjutan hanya dapat terjadi bila masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme partisipatif dalam penyusunan kebijakan, serta memberdayakan komunitas melalui program inovasi berbasis desa, teknologi tepat guna, dan kewirausahaan sosial.
5. **Penguatan Infrastruktur Digital dan Literasi Teknologi**  
Untuk mendukung transformasi inovasi, perlu adanya investasi dalam infrastruktur digital, terutama di wilayah pedesaan. Disertai dengan peningkatan kapasitas

masyarakat dan aparaturn pemerintah dalam pemanfaatan teknologi digital sebagai alat kolaborasi, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi.

6. Monitoring, Evaluasi, dan Replikasi Inovasi Daerah

Diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur terhadap berbagai program inovasi yang telah dijalankan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan replikasi praktik baik di wilayah lain di Provinsi Gorontalo.

7. Penetapan Roadmap Ekosistem Inovasi Daerah

Provinsi Gorontalo perlu menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan ekosistem inovasi yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah. Roadmap ini harus mencakup arah strategis, tahapan implementasi, aktor pelaksana, serta indikator keberhasilan untuk memastikan kesinambungan dan arah pembangunan yang jelas.

### SIMPULAN

Pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam atau kebijakan yang bersifat top-down, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam membangun ekosistem inovasi yang kolaboratif. Studi dan refleksi terhadap dinamika pembangunan di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa integrasi antara pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat menjadi prasyarat penting dalam mendorong lahirnya solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Kolaborasi lintas sektor yang solid memungkinkan pertukaran pengetahuan, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta penguatan kapasitas kelembagaan yang pada akhirnya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, pembentukan ekosistem inovasi yang kondusif membutuhkan komitmen jangka panjang, kebijakan yang adaptif, serta budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan.

Provinsi Gorontalo memiliki potensi besar untuk mengembangkan model pembangunan berbasis inovasi. Dengan memaksimalkan peran aktor-aktor lokal dan mengintegrasikan pendekatan partisipatif dalam proses pembangunan, daerah ini berpeluang menjadi contoh praktik baik pembangunan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, langkah nyata dalam memperkuat sinergi dan merancang kebijakan berbasis inovasi menjadi sangat penting guna memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi, tetapi juga inklusif dan berkeadilan secara sosial.

### DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M., & Latif, A. (2023). Smart governance dan kolaborasi multi-aktor dalam pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 22–37.

- Aswandi, M. (2022). Inovasi dan kolaborasi: Strategi akselerasi pembangunan daerah berbasis potensi lokal. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(1), 55–66.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). *Pembangunan Ekosistem Inovasi Daerah*.
- Dewi, S. L., & Hidayat, M. (2020). Penguatan kolaborasi triple helix untuk pembangunan ekonomi lokal. *Jurnal Sains Dan Inovasi*, 4(3), 78–92.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021*.
- Kementerian PANRB. (2022). *Inovasi Pelayanan Publik 2022: Kumpulan Praktik Baik Daerah*.
- Kurniawan, M. I., & Susilowati, T. (2019). 110–120. <https://doi.org/10.20476/jbb.v27i2.11000>. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 1–13.
- Nurhayati, A. (2020). Penguatan kapasitas kelembagaan daerah dalam pengembangan inovasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 15(1), 22–37.
- Puspitasari, D., & Nugroho, H. (2019). Kolaborasi lintas sektor dalam membangun daya saing daerah berbasis inovasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(1), 14–28.
- Rahmawati, I. (2023). Transformasi digital dan inovasi layanan publik daerah. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 6(1), 33–48.
- Simanjuntak, D. A., & Fadli, M. R. (2022). Ekosistem inovasi di kota-kota menengah Indonesia: Studi kasus Kota Makassar. *Jurnal Inovasi Daerah*, 5(2), 121–135.
- Siregar, H., & Sihombing, R. (2020). Kolaborasi aktor dalam pembangunan berkelanjutan di daerah: Studi pada Program Kampung Iklim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 27(2), 110–120.
- Syamsuddin, H., & Karim, A. (2021). Peran komunitas lokal dalam ekosistem inovasi desa. *Peran Komunitas Lokal Dalam Ekosistem Inovasi Desa. Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovatif*, 2(2), 89–101.
- Taufik, A., & Rahmatullah, A. (2021). Analisis kebijakan inovatif dalam mendukung SDGs di tingkat lokal. *Jurnal Politik Dan Pembangunan*, 10(1), 43–56.
- Wahyudi, R., & Saputra, A. H. (2021). Peran inovasi sosial dalam pembangunan berkelanjutan daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(3), 145–158.